

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJUAN PUSTAKA	3
A. Pengertian Desa	3
B. Masyarakat Sekitar Hutan.....	6
C. Perladangan	10
D. Sosial Ekonomi Masyarakat Pendesa	11
III. METODE PENELITIAN	17
A. Waktu dan Tempat Penelitian	17
B. Alat dan Bahan	17
C. Prosedur Penelitian	17
D. Pengolahan Data.....	18
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
A. Hasil	19
B. Pembahasan	30
V. KESIMPULAN DAN SARAN	34
A. Kesimpulan	34
B. Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	36

I. PENDAHULUAN

Masalah kesejahteraan masyarakat pedesaan di dalam dan sekitar hutan di negara-negara tropis sebelumnya telah menjadi fokus perhatian baik secara nasional maupun internasional. Keberadaan manusia di dalam dan di sekitar hutan sangat mengganggu karena lokasi kawasan hutan yang menjadi sumber keberadaannya semakin berkurang, terutama yang bermata pencaharian sebagai penggarap. Penyempitan tempat kawasan hutan dikaitkan dengan eksploitasi besar-besaran hutan di masa lalu dan ditambah dengan maraknya penambangan batu bara hingga hari ini.

Kebijakan otonomi daerah yang telah digulirkan memberikan peluang dan kemungkinan bagi lokasi Kota Kabupaten untuk memperjuangkan nasib masyarakat dalam UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar pusat dan daerah secara tegas menyatakan bahwa otonomi di tingkat desa dilaksanakan untuk meningkatkan perbaikan ekonomi desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan pendapatan asli desa yang berbeda reputasinya.

Masyarakat desa, terutama di pulau Kalimantan, adalah masyarakat yang pada umumnya tinggal di sekitar atau di dalam hutan. Mata pencaharian mereka adalah bertani. Budidaya yang digunakan adalah budidaya berpindah yang telah dilampaui dari zaman ke generasi. **Alqadrie (1994)** menyebutkan bahwa dengan berkembangnya subsektor perkebunan bagi masyarakat pedesaan, terutama para penggarap, tidak hanya rumah yang dibatasi untuk berpindah tetapi juga tanah-tanah biasa yang dimiliki oleh warga telah diambil alih atau dikelola oleh perusahaan.

Menurut **Basrowi dan Juariyah (2010)** status sosial ekonomi merupakan suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial di posisi tertentu dalam struktur masyarakat. Pemberian posisi ini disertai dengan seperangkat hak dan kewajiban yang hanya dipenuhi si

pembawa statusnya, sehingga kepemilikan lahan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan tinggi atau rendahnya kondisi sosial ekonomi seseorang di masyarakat.

Sebagai hasil logis dari keberadaan komunitas tersebut akan mengalami, antara lain; (a) hilangnya tanah leluhur; (b) reputasi atau posisi sosial ekonomi yang rendah; (c) lingkungan hidup mereka adalah lingkungan yang biasanya dihancurkan atau diubah dengan bantuan lingkungan baru.

Kondisi lingkungan seperti tersebut di atas, di wilayah Kalimantan pada umumnya, tentu telah terjadi, khususnya di daerah-daerah yang terletak di sekitar tempat Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan perkebunan besar-besaran.

Penjelasan di atas mencerminkan betapa terpojoknya masyarakat yang hidupnya ditopang oleh pertanian. Untuk itu, sangat penting untuk mengkaji dan meneliti kondisi masyarakat, terutama masyarakat pembudidaya, agar program perbaikan lingkungan dan wilayah tepat sasaran.

Tujuan dari penelitian ini adalah sekaligus untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat petani di Desa Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi kepada organisasi yang berlaku sebagai statistik utama untuk dipertimbangkan dalam menciptakan lingkungan pertanian di Desa Mamahak Teboq.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2013). Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) Mamahak Teboq.
- Bintarto, R. (2010). Desa Kota. Bandung : Alumni, hlm.6.
- Basrowi, Juariyah S. (2010). Analisis kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Jurnal Ekonomi & Pendidikan.
- Daldjoeni. N. (2011). Interaksi Desa – Kota. Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 4.
- Devung S, (2000). Karakteristik Masyarakat Sekitar Hutan. Jakarta.
- Gohong, G. (1993). Tingkat Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Serta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Pada daerah Opsus Sumpei Karuhei di Kabupaten Kapuas Peropinsi Kalimantan Tengah. Tesis Program Pasca Sarjana IPB. Bogor (tidak dipublikasikan)
- Johan. (1992). Ekologi Perladangan di Indonesia, Study Kasus Dari Daerah Badui Banten Selatan, Jawa Barat Jakarta.
- Kuswandoro. W. (2015). Perspektif Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan. Fisip Universitas Brawijaya. (<http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/perspektif-sosial-dalam-mengatasi-kemiskinan/>) diakses pada tanggal 30 Oktober 2021.
- Nasirotun S. (2013). Pengaruh kondisi sosial ekonomi dan pendidikan orang tua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa. Jurnal Pendidikan Ekonomi IKIP Veteran Semarang.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Pengalaman. D. (2012). Masyarakat Desa Hutan. <http://donipengalaman9.wordpress.com/2012/03/31/masyarakat-desa-hutan/>
- Pujo. (1998). Upaya Pengembangan pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) pada PT KIANI LESTARI, Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur. Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Winaya Mukti.

- Sagala, P. (1994). Mengelola Lahan Kehutanan Indonesia, Yayasan Obor
- Sardjono, M. A. (1995). Budidaya Lembo di Kalimantan Timur, Suatu Model untuk Pengembangan Pemanfaatan Lahan Agroforestry di Daerah Tropis Lembab, Mulawarman Forestry Reports, Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Soong. F. T, (2020). Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pembangunan Desa Memahak Teboq Kabupaten Mahakam Ulu. Vol. 1, No. 2.
- Soetrisno, L. (1995). Menuju Masyarakat Partisipatif. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Sosialisman. (1991). Indonesia Study Meeting in Improvement of Quality of Life in Rural Areas in Asia and The Pacific. Asia Productivity Organizaion, Tokyo Japan.
- Talaohu. M. (2013). Perladangan Berpindah : Antara Masalah Lingkungan dan Masalah Sosial. ISSN 1907-9893. Populis, Volume 7 No 1 Maret 2013. Hal. 59
- Tjiptohrijanto, P & Soemitro, S. (1998). Pemberdayaan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia. PT. Cita Putra Bangsa. Jakarta.
- Widodo, E & Mukhtar. (2000). Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif. Penerbit Adipura, Yogyakarta
- Kementrian Pertanian, (2017). Lahan Ladang Untuk Padi Gogo. Badan Litbang Pertanian. (<https://www.litbang.pertanian.go.id/info-teknologi/2782/>) diakses pada tanggal 30 Oktober 2021.

